

PORTOFOLIO PEMERIKSAAN AKUNTANSI

Nama : Rizka Mufidah
NPM : 2313031001
Kelas : A
Mata Kuliah : Pemeriksaan Akuntansi

PENDAHULUAN PORTOFOLIO

Profesi akuntan publik menempati posisi strategis sebagai penjaga gerbang (gatekeeper) kepercayaan publik terhadap informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan maupun lembaga negara. Ketika opini audit menyimpang dari kondisi keuangan yang sebenarnya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemegang saham, tetapi juga oleh kreditor, karyawan, nasabah, dan masyarakat luas yang menggantungkan keputusan ekonominya pada laporan tersebut. Portofolio ini disusun untuk menelusuri benang merah tersebut: bagaimana kegagalan audit dan manipulasi akuntansi terjadi, mengapa auditor gagal mendeteksinya, dan pelajaran apa yang dapat diambil oleh calon praktisi pemeriksaan akuntansi.

Topik yang menjadi benang merah portofolio ini adalah kegagalan audit dan kecurangan pelaporan keuangan (audit failure dan fraudulent financial reporting), baik yang terjadi pada emiten dan BUMN di Indonesia maupun pada korporasi multinasional. Sepuluh sumber yang dianalisis mencakup rentang waktu 2001 hingga 2025, terdiri atas empat kasus korporasi/BUMN Indonesia (Garuda Indonesia, SNP Finance, Jiwasraya, dan Asabri), empat kasus korporasi internasional (Enron, Toshiba, Wirecard, dan Carillion), serta dua artikel jurnal akademik mengenai teori fraud triangle dan pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap kualitas audit. Kombinasi ini dipilih agar portofolio dapat membandingkan pola kegagalan audit lintas negara dan lintas sektor, sekaligus mengaitkannya dengan kerangka teori yang dipelajari dalam mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi seperti materialitas, independensi, skeptisisme profesional, fraud triangle, dan opini going concern.

Ruang lingkup sumber meliputi siaran pers resmi regulator (OJK, Kementerian Keuangan RI, BPK, FRC Inggris), pemberitaan media massa nasional dan internasional (Kompas, Tempo, CNBC Indonesia, CNN, Reuters/Time), serta artikel jurnal akuntansi terakreditasi nasional. Melalui penelusuran dan analisis kritis atas sumber-sumber tersebut, penulis berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana teori pemeriksaan akuntansi diterapkan atau justru diabaikan dalam praktik nyata.

SUMBER 1

Judul Sumber	Kasus Manipulasi Pengakuan Pendapatan dalam Laporan Keuangan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun Buku 2018
Jenis Sumber	Berita Media Massa / Siaran Pers Regulator
Penulis / Media / Instansi	Kompas.id; Otoritas Jasa Keuangan; Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan RI
Tahun Terbit	2019
Referensi (APA)	Kompas.id. (2019, 28 Juni). Garuda Indonesia Compass Rp100 juta dan diminta perbaiki laporan keuangan. https://www.kompas.id/baca/utama/2019/06/28/garuda-indonesia-didenda-rp-100-juta-dan-diminta-perbaiki-laporan-keuangan

1. Ringkasan Isi Sumber

Kasus ini bermula dari penyusunan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk tahun buku 2018, yang untuk pertama kalinya sejak beberapa tahun terakhir berhasil membukukan laba bersih, alih-alih kerugian yang selama ini menjadi tren perusahaan. Kejanggalan muncul ketika publik mengetahui bahwa perolehan laba tersebut sangat dipengaruhi oleh pengakuan pendapatan senilai 239 juta dolar AS (setara sekitar Rp3,5 triliun) dari perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat antara Garuda Indonesia dan PT Mahata Aero Teknologi. Persoalannya, pembayaran dari Mahata belum diterima secara tunai pada saat laporan keuangan disusun, dan kontrak kerja sama itu sendiri baru berjalan sekitar delapan bulan.

Dua orang komisaris Garuda, yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, menolak menandatangani laporan keuangan tersebut karena menilai pengakuan pendapatan itu tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, khususnya terkait interpretasi apakah perjanjian tersebut mengandung unsur sewa (ISAK 8) dan bagaimana perlakuan akuntansinya menurut PSAK 30. Penolakan ini kemudian menjadi polemik publik yang menarik perhatian Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Garuda maupun terhadap auditor yang mengaudit laporan tersebut, yaitu Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, yang merupakan anggota jaringan audit internasional BDO.

Hasil pemeriksaan Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menyimpulkan bahwa AP Kasner Sirumapea belum sepenuhnya mematuhi tiga Standar

Audit (SA) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu SA 315 tentang pengidentifikasian dan penilaian embel kesalahan penyajian material, SA 500 tentang bukti audit, dan SA 560 tentang peristiwa kemudian. Secara spesifik, auditor dinilai belum menilai secara tepat substansi transaksi untuk menentukan perlakuan akuntansi yang benar, belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, serta belum mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan ketepatan perlakuan akuntansi. Sebagai konsekuensinya, izin AP Kasner Sirumapea dibekukan selama dua belas bulan, KAP-nya menerima peringatan tertulis disertai kewajiban perbaikan kembali pengendalian mutu, sementara Garuda Indonesia dan seluruh direksi serta komisaris yang menandatangani laporan tahunan dikenai denda kembali rative dan diwajibkan menyajikan kembali (restatement) laporan keuangan 2018.

2. Analisis & Pendapat Pribadi

Kasus Garuda Indonesia menarik untuk dianalisis karena ia bukan sekadar persoalan teknis akuntansi, melainkan juga persoalan tata kelola perusahaan dan independensi profesional dalam konteks BUMN yang sarat kepentingan politik dan reputasi. Dari sudut pandang standar audit, pelanggaran yang ditemukan regulator sesungguhnya bersumber pada satu akar masalah: auditor gagal menerapkan skeptisisme profesional secara memadai ketika menilai substansi transaksi Mahata. Prinsip dasar dalam pemeriksaan akuntansi mengajarkan bahwa auditor wajib menilai substance over form, yaitu mendahulukan substansi ekonomi transaksi dibandingkan bentuk hukumnya. Dalam kasus ini, meskipun secara formal terdapat perjanjian kerja sama yang sah, substansi ekonominya menunjukkan bahwa manfaat kas dari transaksi tersebut belum benar-benar terealisasi maupun terjamin kepastiannya, sehingga pengakuan pendapatan secara penuh di muka jelas prematur dan berpotensi menyesatkan pengguna laporan keuangan.

Menariknya, tekanan untuk mengakui pendapatan tersebut tampaknya tidak murni berasal dari motif kecurangan yang disengaja seperti pada kasus-kasus fraud besar, melainkan lebih menyerupai perilaku manajemen laba (*earnings management*) yang didorong oleh tekanan performa perusahaan pelat merah yang telah lama merugi. Dalam kerangka *fraud triangle*, elemen *pressure* di sini sangat kuat. Garuda menghadapi tekanan besar untuk menunjukkan kinerja positif kepada pemerintah, investor domestik, dan pasar modal setelah bertahun-tahun mencatatkan kerugian. Elemen *opportunity* muncul dari ambiguitas standar akuntansi terkait pengakuan pendapatan dari perjanjian kerja sama yang kompleks, sementara elemen *rationalization* tampak dari pemahaman manajemen bahwa kontrak sudah ditandatangani dan disaksikan notaris sehingga dianggap cukup meyakinkan untuk diakui sebagai pendapatan.

Sebagai calon praktisi audit, saya menilai bahwa auditor semestinya menahan diri untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian apabila terdapat perbedaan pendapat yang begitu tajam di internal klien. Dalam hal ini, ditunjukkan oleh penolakan dua komisaris untuk menandatangani laporan keuangan. Perbedaan pendapat semacam itu semestinya menjadi *red flag* yang memicu auditor untuk memperluas prosedur audit, berkonsultasi dengan pihak eksternal atau

technical partner di KAP, bahkan mempertimbangkan opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) apabila ketidakpastian tersebut tidak dapat diselesaikan secara memadai sebelum laporan diterbitkan. Fakta bahwa KAP dinilai belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal menunjukkan adanya kelemahan sistem, bukan sekadar kesalahan individu auditor.

Kasus ini juga menegaskan pentingnya konsep materialitas kualitatif, bukan hanya kuantitatif. Nilai transaksi Mahata sebesar Rp3,5 triliun memang material secara nominal, tetapi yang lebih penting adalah dampaknya yang mengubah laporan laba rugi Garuda dari rugi menjadi laba sebuah perubahan yang sangat material bagi persepsi pasar terhadap kondisi perusahaan, terlepas dari besaran absolutnya. Auditor idealnya mempertimbangkan bahwa transaksi yang mengubah arah penilaian pengguna laporan keuangan (dari rugi ke laba) memerlukan kehati-hatian ekstra, bukan hanya perhitungan ambang batas materialitas standar.

Dampak kasus ini cukup luas: selain sanksi terhadap auditor dan denda terhadap direksi-komisaris, kepercayaan publik terhadap laporan keuangan BUMN tergerus, dan BEI turut menjatuhkan sanksi kepada Garuda. Bagi profesi akuntan publik, kasus ini menjadi pengingat bahwa reputasi jaringan audit internasional (dalam hal ini BDO) tidak serta-merta menjamin kualitas audit yang konsisten di setiap negara anggota jaringan, sehingga penguatan pengawasan eksternal oleh PPPK dan OJK tetap menjadi lini pertahanan penting.

3. Simpulan Singkat Sumber Ini

Kasus Garuda Indonesia mengajarkan bahwa independensi dan skeptisisme profesional auditor diuji paling keras justru ketika klien menghadapi tekanan performa yang tinggi dan terdapat perbedaan pendapat internal; mengabaikan sinyal tersebut dapat merusak kredibilitas laporan keuangan sekaligus karier profesional auditor yang bersangkutan.

SUMBER 2

Judul Sumber	Kegagalan Audit atas Laporan Keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte Indonesia)
Jenis Sumber	Berita Media Massa
Penulis / Media / Instansi	Tempo.co; CNBC Indonesia; Bareksa.com
Tahun Terbit	2018
Referensi (APA)	Tempo.co. (2018, 28 September). Kasus SNP Finance, Kemenkeu jatuhkan sanksi ke Deloitte Indonesia. https://www.tempo.co/ekonomi/kasus-snp-finance-kemenkeu-jatuhkan-sanksi-ke-deloitte-indonesia-812713

1. Ringkasan Isi Sumber

PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) adalah anak usaha Grup Columbia, perusahaan ritel yang dikenal luas dalam bisnis penjualan alat rumah tangga secara kredit. Untuk mendanai kegiatan pembiayaannya, SNP Finance memperoleh fasilitas kredit dari empat belas bank, termasuk Bank Mandiri sebagai kreditor terbesar, serta menerbitkan Medium Term Notes (MTN) yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan, entitas afiliasi Deloitte di Indonesia. Sejak Desember 2015 hingga Maret 2018, peringkat efek SNP Finance bahkan sempat naik dari A- menjadi A, mengindikasikan kepercayaan pasar yang tinggi terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Namun pada Mei 2018, kondisi berbalik drastis: peringkat SNP Finance anjlok menjadi CCC dan kemudian *Selective Default* (SD) dalam bulan yang sama, menandakan perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayarannya. SNP Finance akhirnya mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) senilai sekitar Rp4,07 triliun. Investigasi Bareskrim Polri kemudian mengungkap dugaan pembobolan dana empat belas bank melalui dokumen pencairan kredit yang tidak sesuai kondisi riil, meskipun OJK mengoreksi nilai eksposur perbankan yang sebenarnya menjadi sekitar Rp2,2–2,4 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan, setelah berkoordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan, menyimpulkan bahwa laporan keuangan SNP Finance yang telah diaudit dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian ternyata secara signifikan tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dua akuntan publik yang menandatangani laporan

tersebut, yaitu AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul, dinilai belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit terkait pemahaman atas pengendalian sistem informasi data nasabah, akurasi jurnal piutang pembiayaan konsumen, prosedur deteksi risiko kecurangan, serta skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Sanksi yang dijatuhkan berupa pembatasan pemberian jasa audit di sektor jasa keuangan selama dua belas bulan bagi kedua akuntan publik tersebut, serta pembatalan pendaftaran (*deregistrasi*) KAP Satrio Bing Eny & Rekan untuk sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.

2. Analisis & Pendapat Pribadi

Kasus SNP Finance menjadi salah satu preseden penting mengenai bagaimana kegagalan audit atas satu entitas dapat merambat menjadi risiko sistemik bagi banyak pihak: empat belas bank pemberi kredit, pemegang MTN, dan pada akhirnya kepercayaan pasar terhadap kualitas audit KAP besar berjangkauan internasional di Indonesia. Yang membuat kasus ini istimewa adalah keterlibatan Deloitte, salah satu dari empat KAP terbesar di dunia (Big Four), yang selama ini identik dengan standar audit tinggi. Fakta bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian tetap diberikan meski kondisi keuangan riil perusahaan jauh berbeda menunjukkan bahwa ukuran dan reputasi KAP tidak otomatis menjamin kualitas audit sebuah temuan yang sejalan dengan berbagai riset akuntansi mengenai audit quality yang akan saya bahas lebih lanjut pada sumber jurnal dalam portofolio ini.

Ditinjau dari perspektif bukti audit (SA 500), pelanggaran utama auditor terletak pada kegagalan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat (*sufficient appropriate audit evidence*) atas akun piutang pembiayaan konsumen, yang notabene merupakan akun paling material dalam laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Prosedur konfirmasi piutang kepada nasabah, verifikasi independen atas keberadaan dan validitas piutang, serta uji substantif atas pengakuan pendapatan pembiayaan seharusnya menjadi fokus utama audit pada entitas multifinance semacam ini, mengingat model bisnisnya sangat bergantung pada kualitas portofolio piutang. Kegagalan dalam area ini mengindikasikan bahwa auditor mungkin terlalu mengandalkan representasi manajemen (*management representation*) tanpa verifikasi independen yang memadai.

Dari perspektif teori fraud triangle, tekanan (*pressure*) dalam kasus ini kemungkinan besar berasal dari kondisi bisnis ritel Grup Columbia yang melambat, sehingga SNP Finance sebagai unit pembiayaannya perlu terus menunjukkan kinerja piutang yang sehat agar tetap memperoleh pendanaan perbankan dan mempertahankan peringkat kredit MTN-nya. Kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan manipulasi laporan keuangan terbuka lebar karena sifat piutang konsumen yang sulit diverifikasi secara individual dalam jumlah besar, ditambah kelemahan sistem pengendalian mutu KAP dalam hal konsultasi dan supervisi tim audit senior sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan sanksi bahwa terdapat ancaman kedekatan (*familiarity threat*) anggota tim perikatan senior dengan klien.

Jika saya berada pada posisi auditor dalam penugasan semacam ini, pendekatan yang akan saya lakukan berbeda, yaitu memperkuat prosedur audit siklus pendapatan dan piutang

melalui teknik audit berbantuan komputer (*Computer-Assisted Audit Techniques/CAATs*) untuk melakukan analisis populasi penuh (*full population testing*) atas data piutang, bukan hanya *sampling* konvensional, mengingat skala dan volume transaksi pembiayaan konsumen yang sangat besar. Selain itu, rotasi partner dan peningkatan independensi tim perikatan perlu ditegakkan secara lebih ketat untuk menghindari *familiarity threat* yang disinyalir turut berkontribusi terhadap kegagalan audit ini.

Dampak kasus ini terhadap profesi cukup signifikan: ia menjadi salah satu pemicu penguatan pengawasan OJK terhadap KAP yang mengaudit entitas jasa keuangan, serta memperkuat urgensi penerapan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP. Bagi investor, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dari KAP besar sekalipun tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar pengambilan keputusan investasi tanpa analisis kredit yang independen.

3. Simpulan Singkat Sumber Ini

Kasus SNP Finance menegaskan bahwa reputasi besar sebuah jaringan KAP internasional tidak menjamin kualitas audit di tingkat penugasan individual, dan bahwa kegagalan memperoleh bukti audit yang cukup atas akun piutang dapat menimbulkan risiko sistemik bagi banyak kreditor sekaligus.

SUMBER 3

Judul Sumber	Skandal Gagal Bayar Polis dan Manipulasi Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
Jenis Sumber	Berita Media Massa / Laporan Pemeriksaan BPK
Penulis / Media / Instansi	Badan Pemeriksa Keuangan RI; Kompas.com; CNBC Indonesia
Tahun Terbit	2020
Referensi (APA)	Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2020, 9 Maret). Kerugian negara kasus Jiwasraya Rp16,81 triliun. https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun

1. Ringkasan Isi Sumber

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia, berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Menurut penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), persoalan keuangan Jiwasraya sesungguhnya telah muncul sejak 2002, namun baru mengemuka ke publik pada 2018 ketika perusahaan gagal membayar klaim polis JS Saving Plan senilai Rp802 miliar kepada nasabah. BPK menemukan bahwa sejak 2006, Jiwasraya telah membukukan laba yang bersifat semu akibat rekayasa akuntansi, sehingga pada pemeriksaan laporan keuangan 2006–2007, BPK bahkan memberikan opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) karena penyajian cadangan teknis tidak dapat diyakini kebenarannya.

Puncak persoalan terjadi pada 2015 ketika Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan iming-iming bunga tinggi 9–13 persen per tahun untuk menarik dana nasabah dalam jumlah besar. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan secara serampangan pada saham-saham berkinerja buruk dan berisiko tinggi, termasuk saham-saham yang terafiliasi dengan pihak-pihak tertentu seperti Grup Bakrie dan PT Hanson International milik Benny Tjokrosaputro. Pada laporan keuangan 2017, Jiwasraya memperoleh opini tidak wajar dari auditor karena kekurangan pencadangan sebesar Rp7,7 triliun—sebuah temuan yang seharusnya menjadi peringatan dini bagi regulator dan publik, namun tidak diikuti tindakan korektif yang memadai.

Investigasi BPK atas permintaan Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan bahwa kerugian negara akibat penyimpanan pengelolaan investasi saham dan reksa dana Jiwasraya selama periode 2008–2018 mencapai Rp16,81 triliun, dengan modus operandi berupa jual-beli saham dalam waktu berdekatan untuk menghindari pencatatan kerugian belum terealisasi (unrealized loss), serta negosiasi harga pembelian saham dengan pihak-pihak tertentu dalam kelompok usaha

yang sama. Sejumlah mantan direksi Jiwasraya dan pengusaha yang terlibat, termasuk Benny Tjokrosaputro, kemudian diproses secara pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

2. Analisis & Pendapat Pribadi

Kasus Jiwasraya adalah contoh nyata bagaimana kegagalan mendeteksi dan menindaklanjuti opini audit going concern maupun opini tidak wajar dapat berujung pada kerugian negara dalam skala luar biasa besar. Yang paling mencolok dari kasus ini adalah bahwa sinyal peringatan sesungguhnya telah muncul jauh sebelum skandal terungkap ke public opini disclaimer BPK pada 2006–2007 dan opini tidak wajar pada 2017 semestinya memicu langkah pengawasan tegas dari OJK dan pemegang saham (dalam hal ini Kementerian BUMN). Fakta bahwa perusahaan tetap diizinkan menjual produk saving plan bervolume besar di tengah kondisi keuangan yang sudah bermasalah menunjukkan lemahnya koordinasi antara fungsi audit, pengawasan sektor keuangan, dan tata kelola korporasi BUMN.

Dari sudut pandang standar audit mengenai opini going concern, kasus ini menegaskan bahwa opini audit bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan sinyal krusial bagi pengambil kebijakan. Ironisnya, opini tidak wajar yang diberikan pada 2017 justru datang terlambat setelah Jiwasraya sempat memasarkan produk saving plan bertahun-tahun dengan iming-iming imbal hasil tinggi yang tidak realistis dibandingkan kondisi pasar. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya opinion shopping atau tekanan terhadap auditor pada tahun-tahun sebelumnya agar tetap memberikan opini yang lebih ringan, sebuah fenomena yang justru menjadi topik penelitian akademik yang akan saya bahas pada sumber jurnal audit quality dalam portofolio ini.

Dalam kerangka fraud triangle, elemen pressure pada kasus ini berasal dari kebutuhan Jiwasraya menutup defisit likuiditas yang telah menumpuk sejak lama sehingga tergoda menjual produk saving plan berbunga tinggi sebagai jalan pintas memperoleh dana segar sebuah pola yang menyerupai skema Ponzi karena pembayaran bunga kepada nasabah lama sesungguhnya dibiayai dari setoran nasabah baru. Elemen opportunity muncul dari lemahnya pengawasan OJK terhadap Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dibandingkan sektor perbankan yang sudah lebih matang regulasinya pasca-krisis 1998, sebagaimana disoroti oleh pengamat asuransi dalam pemberitaan CNBC Indonesia. Elemen rationalization tampak dari pola pikir manajemen yang menunda pengakuan kerugian investasi dengan keyakinan bahwa harga saham akan pulih di kemudian hari, padahal secara akuntansi kerugian belum terealisasi seharusnya tetap diungkapkan sesuai prinsip kehati-hatian.

Konsep materialitas dan bukti audit kembali menjadi sorotan dalam kasus ini, khususnya terkait penilaian wajar (fair value) atas portofolio saham dan reksa dana yang tidak likuid. Auditor menghadapi tantangan signifikan dalam menilai kewajaran harga saham-saham yang jarang diperdagangkan (thinly traded) dan berpotensi dimanipulasi melalui transaksi antarpihak berelasi. Jika saya menjadi auditor dalam penugasan serupa, saya akan menerapkan prosedur audit

tambahan berupa analisis independent price verification menggunakan sumber data pasar pihak ketiga, serta menelusuri pola transaksi jual-beli saham dalam rentang waktu berdekatan (round-trip trading) sebagai indikator potensi manipulasi harga.

Dampak sosial dari kasus ini sangat besar: sekitar 2,6 juta pemegang polis, mayoritas nasabah menengah ke bawah dan pemegang manfaat pensiun, terdampak langsung oleh gagal bayar ini, memaksa pemerintah menyuntikkan dana penyelamatan Rp22 triliun melalui pembentukan IFG Life. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa kegagalan pengawasan dan audit pada institusi keuangan negara berdampak jauh lebih luas dibandingkan kegagalan audit pada perusahaan swasta biasa, karena menyangkut dana publik dan kepercayaan terhadap institusi milik negara.

3. Simpulan Singkat Sumber Ini

Skandal Jiwasraya menunjukkan bahwa opini audit yang memburuk secara bertahap—dari disclaimer hingga opini tidak wajar adalah sinyal dini yang seharusnya memicu tindakan pengawasan tegas, dan bahwa penilaian wajar atas aset investasi tidak likuid memerlukan skeptisisme profesional ekstra untuk mencegah manipulasi harga antarpihak berelasi.

SUMBER 4

Judul Sumber	Korupsi Pengelolaan Dana Investasi PT Asabri (Persero) dan Kerugian Negara Rp22,78 Triliun
Jenis Sumber	Laporan Pemeriksaan BPK / Berita Media Massa
Penulis / Media / Instansi	Badan Pemeriksa Keuangan RI; Kompas.com
Tahun Terbit	2021
Referensi (APA)	Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2021, 31 Mei). Kasus PT Asabri rugikan negara Rp22,78 triliun. https://wartabpk.go.id/kasus-pt-asabri-rugikan-negara-rp2278-triliun/

1. Ringkasan Isi Sumber

PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri adalah BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki negara dan bertugas mengelola dana pensiun serta asuransi bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri. Antara tahun 2012 hingga 2019, sejumlah petinggi Asabri termasuk mantan Direktur Utama, Direktur Investasi, dan Direktur Keuangan diduga berkolusi dengan pihak eksternal yang bukan konsultan maupun manajer investasi resmi, yaitu Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman Purnomosidi, untuk mengatur dan mengendalikan transaksi investasi saham dan reksa dana milik Asabri.

Modus yang digunakan adalah transaksi jual-beli saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik ketiga pihak eksternal tersebut yang harganya telah dimanipulasi agar tampak bernilai tinggi, sehingga kinerja portofolio investasi Asabri terlihat baik di atas kertas meski sebenarnya terus memburuk. Ketika pihak eksternal menjual kembali saham dengan harga jauh lebih murah, pihak Asabri justru membelinya kembali, sebuah pola yang menguntungkan pihak luar namun merugikan perusahaan secara signifikan. Menurut hasil pemeriksaan investigatif BPK yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 27 Mei 2021, penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Asabri selama periode 2012–2019 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp22,78 triliun, dengan investasi ditempatkan pada saham dan reksa dana berisiko tinggi serta tidak likuid yang tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, dan mantan Direktur Utama Asabri periode 2011–2016, Mayjen Purn. Adam Rachmat Damiri, divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta beserta kewajiban membayar uang pengganti kepada negara. Kasus Asabri sering disandingkan dengan kasus Jiwasraya karena kemiripan pola manipulasi investasi dan keterlibatan aktor-aktor eksternal yang sama, termasuk Benny Tjokrosaputro.

2. Analisis & Pendapat Pribadi

Kasus Asabri memiliki relevansi kuat untuk dianalisis berdampingan dengan kasus Jiwasraya karena keduanya menunjukkan pola kegagalan tata kelola dan pemeriksaan yang serupa pada institusi keuangan milik negara: penempatan dana pada instrumen investasi berisiko tinggi dan tidak likuid, keterlibatan pihak eksternal yang sama, serta lemahnya pengawasan internal maupun eksternal yang seharusnya mendeteksi manipulasi harga saham lebih dini. Perbedaan utamanya terletak pada sifat dana yang dikelola Asabri mengelola dana pensiun dan asuransi bagi anggota TNI/Polri, sehingga kegagalan pengelolaannya memiliki dimensi sensitivitas keamanan nasional selain dimensi ekonomi.

Dari sudut pandang teknik audit investigatif, kasus ini menunjukkan pentingnya analisis arus kas dan penelusuran pola transaksi antarpihak berelasi (related party transactions) untuk mendeteksi skema manipulasi harga saham. Salah satu artikel akademik yang membahas kasus ini bahkan menerapkan pendekatan cash flow shenanigans untuk mengidentifikasi indikasi manipulasi arus kas Asabri, misalnya dengan menemukan pola pencatatan arus kas dari pinjaman bank sebagai arus kas operasional sebuah teknik yang secara sengaja mengaburkan gambaran kesehatan arus kas operasional perusahaan yang sesungguhnya. Pola semacam ini seharusnya dapat dideteksi melalui analisis rasio dan tren arus kas dari waktu ke waktu, bukan hanya melalui pemeriksaan dokumen transaksi individual.

Ditinjau dari fraud triangle, elemen opportunity dalam kasus Asabri sangat menonjol karena kombinasi antara lemahnya pengawasan investasi BUMN sektor pertahanan-keamanan yang relatif kurang transparan dibandingkan BUMN sektor korporasi umum, serta minimnya keterlibatan pihak independen dalam proses penetapan harga transaksi saham. Elemen rationalization dapat dilihat dari pola konsisten manajemen yang membenarkan penempatan investasi berisiko tinggi dengan dalih potensi keuntungan besar, sebuah argumen yang sering digunakan untuk menutupi motif kolusi dengan pihak luar. Sementara elemen pressure kemungkinan berasal dari target kinerja investasi tahunan yang harus dicapai oleh direksi, mendorong mereka mengambil jalan pintas melalui kerja sama dengan pihak yang menjanjikan kinerja portofolio terlihat baik secara instan.

Sebagai calon auditor atau pemeriksa investasi BUMN, pelajaran penting yang dapat diambil adalah perlunya independent valuation atas seluruh instrumen investasi yang tidak diperdagangkan secara aktif di pasar terbuka, serta pemeriksaan mendalam terhadap identitas dan hubungan pihak-pihak yang bertransaksi dengan perusahaan, khususnya jika pola transaksi menunjukkan konsentrasi berulang pada segelintir pihak yang sama. Auditor maupun pengawas internal semestinya juga menetapkan ambang batas toleransi risiko (risk appetite) yang jelas untuk investasi dana publik/dana pensiun, mengingat sifat dana tersebut yang idealnya dikelola secara konservatif, bukan spekulatif.

Konsekuensi kasus Asabri terhadap kepercayaan instru terhadap tata instru BUMN sangat besar, khususnya karena menyangkut dana instrum prajurit TNI dan Polri yang notabene

merupakan kelompok yang seharusnya paling dilindungi kesejahteraannya oleh negara. Kasus ini instrumen kasus Jiwasraya mendorong reformasi pengawasan investasi BUMN instrumen dan dana instrumen oleh OJK, termasuk penguatan aturan mengenai instrumen alokasi investasi pada instrumen berisiko tinggi.

3. Simpulan Singkat Sumber Ini

Kasus Asabri menegaskan bahwa manipulasi harga saham melalui transaksi antarpihak berelasi dapat menyamarkan kerugian investasi dalam jangka panjang, dan bahwa pemeriksaan investigatif berbasis analisis arus kas terbukti efektif untuk mengungkap kecurangan yang tidak tampak dari laporan keuangan permukaan.

SUMBER 5

Judul Sumber	Skandal Akuntansi Enron Corporation dan Runtuhnya Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen
Jenis Sumber	Berita Media Massa Internasional
Penulis / Media / Instansi	Britannica; Wikipedia; Time
Tahun Terbit	2001
Referensi (APA)	Britannica. (2026). Enron scandal: Accounting fraud, corporate greed, bankruptcy. https://www.britannica.com/event/Enron-scandal

1. Ringkasan Isi Sumber

Enron Corporation adalah perusahaan energi asal Houston, Texas, yang didirikan pada 1985 melalui merger Houston Natural Gas dan InterNorth. Sepanjang dekade 1990-an, Enron bertransformasi dari perusahaan pipa gas alam konvensional menjadi konglomerat perdagangan energi dan derivatif yang sangat inovatif, bahkan sempat memperdagangkan kontrak derivatif untuk komoditas seagam listrik, batu bara, kertas, hingga cuaca. Pada puncak kejayaannya, nilai aset Enron melebihi 60 miliar dolar AS dan sahamnya menjadi favorit investor Wall Street.

Di balik kesuksesan tersebut, manajemen Enron dipimpin Kenneth Lay dan kemudian Jeffrey Skilling sebagai CEO, dengan Andrew Fastow sebagai Chief Financial Officer menggunakan teknik akuntansi mark-to-market secara agresif untuk mencatat keuntungan masa depan yang belum terealisasi sebagai pendapatan saat ini, sekaligus mendirikan lebih dari 3.000 Special Purpose Entities (SPE) untuk memindahkan aset bermasalah dan utang keluar dari neraca konsolidasi Enron. Banyak dari SPE tersebut, seperti kelompok bernama 'Raptors', dikelola langsung oleh Fastow sendiri yang turut memiliki kepentingan finansial pribadi di dalamnya sebuah pelanggaran mendasar terhadap prinsip independensi dan larangan konflik kepentingan dalam tata kelola korporasi.

Arthur Andersen, salah satu dari lima KAP terbesar dunia saat itu (Big Five), berperan ganda sebagai auditor eksternal sekaligus konsultan internal Enron, dengan pendapatan jasa konsultasi yang hampir menyamai pendapatan jasa audit. Ketika skema akuntansi Enron mulai terbongkar pada Oktober 2001 setelah perusahaan mengumumkan kerugian 638 juta dolar AS dan pengurangan ekuitas pemegang saham sebesar 1,2 miliar dolar AS, harga saham Enron anjlok dari 90 dolar AS menjadi kurang dari 1 dolar AS dalam hitungan bulan. Enron mengajukan kebangkrutan pada 2 Desember 2001 kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat saat

itu sementara Arthur Andersen dinyatakan bersalah atas obstruction of justice karena memusnahkan dokumen audit terkait Enron, yang berujung pada bubarnya kantor akuntan berusia hampir 90 tahun tersebut.

2. Analisis & Pendapat Pribadi

Kasus Enron adalah studi kasus paling ikonik dalam sejarah pendidikan akuntansi dan audit karena ia menggabungkan hampir seluruh elemen kegagalan tata kelola sekaligus: manipulasi akuntansi yang canggih (mark-to-market dan SPE), konflik kepentingan struktural auditor, dan kegagalan pengawasan internal (dewan komisaris dan komite audit). Yang paling fundamental dari perspektif pemeriksaan akuntansi adalah pelanggaran independensi auditor: Arthur Andersen memperoleh pendapatan sekitar 25 juta dolar AS dari jasa audit dan 27 juta dolar AS dari jasa konsultasi Enron pada tahun 2000 saja, sehingga muncul pertanyaan mendasar apakah auditor mampu bersikap objektif ketika mengevaluasi kebijakan akuntansi yang justru mereka rancang sendiri sebagai konsultan.

Konsep SPE dalam kasus Enron menunjukkan bagaimana standar akuntansi yang kompleks dan berbasis aturan (rules-based) seperti US GAAP pada masa itu dapat dieksploitasi melalui rekayasa struktur transaksi yang secara formal memenuhi kriteria teknis, namun secara substansi ekonomi menyesatkan. Sebagai contoh, standar SFAS 125 dan ketentuan Emerging Issues Task Force (EITF) mensyaratkan ambang kepemilikan independen minimal tertentu (umumnya 3 persen) agar sebuah SPE dapat dianggap terpisah dari neraca konsolidasi sponsor. Enron dan penasihatnya secara sengaja merancang struktur SPE agar tepat memenuhi ambang batas teknis tersebut, sebuah praktik yang dalam pendidikan akuntansi sering disebut sebagai 'financial engineering' penyalahgunaan celah standar untuk tujuan menyesatkan, bukan untuk tujuan bisnis yang sah.

Dalam kerangka fraud triangle, pressure pada kasus Enron berasal dari ekspektasi pasar modal yang sangat tinggi terhadap pertumbuhan laba berkelanjutan (earnings growth), yang mendorong manajemen mencari cara mempertahankan tren laba positif meski kinerja bisnis riil mulai melemah. Opportunity muncul dari kompleksitas transaksi derivatif dan SPE yang sulit dipahami bahkan oleh anggota dewan komisaris dan analis pasar modal berpengalaman sekalipun, ditambah lemahnya pengawasan komite audit yang menyetujui berbagai transaksi SPE tanpa pengujian independen yang memadai. Rationalization tercermin dari keyakinan eksekutif Enron bahwa mereka adalah 'orang-orang paling cerdas di ruangan' (the smartest guys in the room) julukan yang kemudian menjadi ironi setelah keruntuhan Perusahaan yang merasa berhak mengambil risiko akuntansi ekstrem karena yakin mampu mengelolanya.

Sebagai calon auditor, pelajaran paling penting dari kasus Enron adalah pentingnya memisahkan secara tegas jasa audit dan jasa non-audit (terutama konsultasi) untuk klien yang sama, sebuah prinsip yang kemudian secara eksplisit diatur dalam Sarbanes-Oxley Act 2002 di Amerika Serikat dan turut memengaruhi kerangka regulasi profesi akuntan publik di berbagai negara termasuk Indonesia. Selain itu, auditor semestinya menolak untuk hanya menguji

kepatuhan formal terhadap aturan teknis (rules-based compliance) tanpa mempertanyakan substansi ekonomi dan tujuan bisnis dari struktur transaksi yang sangat kompleks sebuah pendekatan yang dikenal sebagai substance over form.

Dampak jangka panjang kasus Enron sangat transformatif bagi profesi akuntan publik secara global: ia melahirkan Sarbanes-Oxley Act, pembentukan Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) sebagai regulator independen bagi auditor perusahaan publik di AS, larangan tegas KAP memberikan jasa konsultasi kepada klien audit yang sama, serta persyaratan rotasi partner audit secara berkala. Perubahan Big Five menjadi Big Four akibat runtuhnya Arthur Andersen juga mengubah lanskap kompetisi jasa audit global secara permanen hingga saat ini.

3. Simpulan Singkat Sumber Ini

Kasus Enron membuktikan bahwa independensi auditor bukan sekadar formalitas etika, melainkan prasyarat struktural bagi kualitas audit ketika KAP menerima pendapatan konsultasi yang setara atau melebihi pendapatan audit dari klien yang sama, objektivitas profesional menjadi sangat rentan terkompromikan.

SUMBER 6

Judul Sumber	Manipulasi Laba Toshiba Corporation Senilai 1,2 Miliar Dolar AS melalui Penyalahgunaan Metode Percentage-of-Completion
Jenis Sumber	Berita Media Massa Internasional
Penulis / Media / Instansi	CNBC; Time; Robert H. Smith School of Business
Tahun Terbit	2015
Referensi (APA)	CNBC. (2015, 20 Juli). Toshiba inflated profits by \$1.2 bln with top execs' knowledge - investigation. https://www.cnn.com/2015/07/20/toshiba-inflated-profits-by-12-bln-with-top-execs-knowledge--investigation.html

1. Ringkasan Isi Sumber

Toshiba Corporation adalah konglomerat elektronik dan infrastruktur Jepang berusia lebih dari 140 tahun yang produknya mencakup televisi, komputer, hingga pembangkit listrik. Pada Januari 2015, Badan Pengawas Bursa dan Sekuritas Jepang (SESC) menerima laporan whistleblower melalui surel yang mengungkapkan dugaan praktik akuntansi tidak wajar dalam bisnis infrastruktur Toshiba, khususnya terkait penerapan metode percentage-of-completion untuk mengakui pendapatan dan biaya proyek jangka panjang. SESC menilai Toshiba tidak mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penerapan metode tersebut, memicu Toshiba melakukan investigasi internal yang kemudian diperluas menjadi investigasi independen.

Pada 8 Mei 2015, Toshiba menarik proyeksi labanya dan membatalkan pembagian dividen tahunan akibat penundaan yang disebabkan investigasi internal atas kegagalan akuntansi. Komite investigasi independen yang dipimpin mantan jaksa Tokyo akhirnya menerbitkan laporan pada 20 Juli 2015 yang mengungkapkan bahwa Toshiba telah menggelembungkan laba operasi sebesar 151,8 miliar yen (setara sekitar 1,22 miliar dolar AS) selama kurun waktu tujuh tahun sejak krisis finansial global 2008. Angka ini bahkan tiga kali lipat lebih besar dibandingkan estimasi awal internal Toshiba sendiri, yang semula hanya memperkirakan penggelembungan sebesar 4,4 miliar yen.

Investigasi menemukan bahwa manipulasi akuntansi ini bersifat institusional dan melibatkan pengetahuan langsung manajemen puncak, termasuk CEO Hisao Tanaka dan mantan CEO/Wakil Ketua Norio Sasaki, yang secara sadar membiarkan bahkan mendorong penundaan pengakuan kerugian proyek serta mempercepat pengakuan pendapatan sebelum pekerjaan benar-benar selesai. Sebanyak 98 eksekutif teridentifikasi terlibat aktif dalam praktik ini, didorong oleh

budaya perusahaan yang tidak memungkinkan karyawan menentang keinginan atasan (corporate culture where employees cannot act contrary to the intent of superiors). Tanaka, Sasaki, dan satu mantan CEO lainnya mengundurkan diri, dan lebih dari separuh anggota dewan direksi diganti dalam rapat pemegang saham berikutnya.

2. Analisis & Pendapat Pribadi

Kasus Toshiba menawarkan perspektif menarik yang berbeda dari kasus-kasus lain dalam portofolio ini karena manipulasi akuntansi di sini tidak melibatkan entitas bertujuan khusus yang kompleks (seperti Enron) maupun kolusi dengan pihak eksternal (seperti Jiwasraya dan Asabri), melainkan murni penyalahgunaan estimasi akuntansi dalam metode percentage-of-completion untuk proyek jangka panjang di divisi infrastruktur sosial. Metode ini pada dasarnya sah dan diakui dalam standar akuntansi (termasuk PSAK 34 di Indonesia yang mengadopsi IFRS 15/IAS 11 sebelumnya), namun sangat rentan disalahgunakan karena mengandalkan estimasi manajemen atas persentase penyelesaian pekerjaan dan estimasi biaya total proyek dua variabel yang secara inheren subjektif dan sulit diverifikasi secara independen oleh auditor.

Dari perspektif teknik manipulasi, investigasi menemukan bahwa Toshiba secara sengaja menunda pengakuan provisi kerugian kontrak (provision for contract losses) meskipun manajemen proyek dan departemen bisnis sudah memahami bahwa kerugian tersebut pada akhirnya tidak terhindarkan. Penundaan ini dilakukan dengan dalih adanya kemungkinan negosiasi ulang kontrak (contract change/CD) yang dapat memperbaiki margin proyek di masa depan sebuah bentuk optimisme berlebihan yang tidak didukung bukti objektif, dan justru bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (prudence) dalam akuntansi yang mensyaratkan kerugian diakui segera setelah dapat diperkirakan secara wajar, bukan ditunda hingga benar-benar terealisasi.

Dalam kerangka fraud triangle, elemen pressure pada kasus Toshiba sangat eksplisit disebutkan dalam laporan investigasi sebagai 'kebijakan laba periode berjalan yang mengesampingkan segalanya' (over-riding current-term profit policy) dan tekanan kuat untuk mencapai target anggaran. Elemen opportunity muncul dari sifat estimasi akuntansi proyek jangka panjang yang secara inheren sulit diverifikasi pihak luar, sementara elemen rationalization tercermin jelas dari budaya korporat Jepang yang sangat hierarkis, di mana bawahan merasa tidak memiliki ruang untuk menentang arahan atasan meskipun mengetahui bahwa praktik akuntansi yang diminta tidak tepat sebuah dimensi budaya organisasi yang jarang muncul secara eksplisit dalam kasus-kasus fraud di negara lain.

Sebagai calon auditor, kasus ini menegaskan pentingnya penerapan prosedur audit spesifik untuk kontrak konstruksi/proyek jangka panjang, meliputi: reviu independen atas estimasi biaya penyelesaian proyek dengan melibatkan tenaga ahli teknis (bukan hanya akuntan) apabila diperlukan, analisis tren margin proyek dari waktu ke waktu untuk mendeteksi pola penundaan kerugian, serta wawancara langsung dengan manajer proyek di lapangan (bukan hanya manajemen puncak) untuk memperoleh gambaran independen mengenai kondisi riil proyek. Auditor juga

perlu mewaspadai budaya organisasi yang sangat top-down sebagai faktor risiko kecurangan non-finansial yang dapat memengaruhi keandalan representasi manajemen.

Skandal ini menjadi guncangan besar bagi dunia bisnis Jepang yang selama ini dikenal dengan tata anjan konservatif, dan mendorong reformasi standar tata anjan anjang en Jepang termasuk penguatan peran komisaris anjang ent dalam struktur dewan direksi yang sebelumnya didominasi insider. Meskipun tidak ada tuntutan pidana yang diajukan pasca-skandal ini, sejumlah gugatan perdata dari investor institusional seperti Mitsubishi UFJ Trust turut mengiringi dampak jangka anjang kasus ini terhadap reputasi Toshiba.

3. Simpulan Singkat Sumber Ini

Kasus Toshiba menunjukkan bahwa metode akuntansi berbasis estimasi seperti percentage-of-completion sangat rentan dimanipulasi melalui penundaan pengakuan kerugian, dan bahwa budaya organisasi yang terlalu hierarkis dapat menjadi faktor kecurangan non-finansial yang harus diwaspadai auditor selain faktor tekanan finansial konvensional.

SUMBER 7

Judul Sumber	Kegagalan Audit EY atas Wirecard AG dan Hilangnya 1,9 Miliar Euro Aset Fiktif
Jenis Sumber	Berita Media Massa Internasional
Penulis / Media / Instansi	CNN Business; PYMNTS.com; Wikipedia
Tahun Terbit	2020
Referensi (APA)	CNN Business. (2023, 3 April). EY banned from auditing public interest companies in Germany over Wirecard. https://www.cnn.com/2023/04/03/business/wirecard-ey-ban-germany/

1. Ringkasan Isi Sumber

Wirecard AG adalah perusahaan teknologi finansial (fintech) asal Jerman yang menyediakan layanan pemrosesan pembayaran daring, didirikan pada 1999 dan berkembang pesat di bawah kepemimpinan CEO Markus Braun sejak 2002. Pada puncak kejayaannya tahun 2018, nilai kapitalisasi pasar Wirecard mencapai 24 miliar euro, melampaui nilai Deutsche Bank, dan perusahaan ini masuk dalam indeks saham bergengsi DAX 30 Jerman, menggantikan Commerzbank. Sejak 2008, EY (Ernst & Young) menjadi auditor utama Wirecard setelah melakukan audit khusus merespons kritik awal terkait irregularitas neraca perusahaan.

Sepanjang 2015–2019, Financial Times secara konsisten menerbitkan serangkaian investigasi jurnalistik yang mempertanyakan kesenjangan mencolok antara volume transaksi pembayaran Wirecard dengan aset jangka pendek yang tercatat, khususnya terkait operasi bisnis di Asia (Singapura, Filipina, dan Dubai) yang diduga fiktif atau beroperasi dengan pengawasan regulasi yang sangat minim. Wirecard secara konsisten membantah seluruh tuduhan tersebut dan bahkan menggunakan firma hukum serta konsultan PR untuk melawan balik tuduhan media, sementara regulator keuangan Jerman (BaFin) justru cenderung membela Wirecard dan menyelidiki para short-seller serta jurnalis investigatif yang mengkritik perusahaan.

Skandal ini akhirnya meledak pada Juni 2020 ketika Wirecard mengumumkan bahwa 1,9 miliar euro dana yang diklaim tersimpan dalam rekening kepercayaan (trustee account) di Asia kemungkinan besar tidak pernah ada. EY menolak menandatangani laporan keuangan 2019 Wirecard, memicu pengunduran diri dan penangkapan CEO Markus Braun dengan tuduhan menggelembungkan neraca edenda an secara sengaja, sementara COO Jan Marsalek melarikan diri dan menjadi buronan internasional hingga kini. Wirecard mengajukan kebangkrutan pada 25

Juni 2020. Investigasi selanjutnya oleh regulator audit Jerman (APAS) menyimpulkan bahwa opini audit EY selama bertahun-tahun ‘secara objektif tidak akurat’ dan sistem pengendalian mutu internal EY mengalami kegagalan serius, sehingga pada 2023 EY dilarang mengaudit perusahaan berkepentingan sistem di Jerman selama dua tahun dan denda 500.000 euro.

2. Analisis & Pendapat Pribadi

Kasus Wirecard adalah salah satu kegagalan audit paling mencolok dalam sejarah Eropa modern karena EY, sebagai auditor selama hampir satu dekade, gagal melakukan prosedur audit paling dasar sekalipun: konfirmasi langsung saldo bank kepada pihak ketiga (bank confirmation) untuk memverifikasi keberadaan 1,9 miliar euro yang diklaim tersimpan dalam rekening kepercayaan di Asia. Prosedur konfirmasi bank adalah salah satu teknik audit paling fundamental yang diajarkan sejak awal pendidikan akuntansi, sehingga kegagalan menerapkannya selama bertahun-tahun menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas dan integritas pelaksanaan audit di lapangan, bukan sekadar kelemahan metodologi.

Artikel jurnal akademik yang membahas kasus ini secara spesifik menyoroti bahwa EY tidak pernah memverifikasi keabsahan hubungan Wirecard dengan pihak ketiga pemroses pembayaran (third-party acquiring partners) di Asia, maupun arus kas yang seharusnya menyertai pendapatan yang diklaim dihasilkan dari kerja sama tersebut. Kegagalan melakukan pengujian substantif atas saldo material ini secara langsung melanggar Standar Audit Internasional (ISA) 200 tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan ISA 240 tentang tanggung jawab auditor terkait kecurangan dalam audit laporan keuangan, yang keduanya menegaskan pentingnya skeptisisme profesional dan verifikasi independen, bukan sekadar mengandalkan representasi manajemen.

Dalam kerangka fraud triangle, opportunity pada kasus Wirecard diperbesar oleh struktur bisnis fintech yang kompleks dan lintas yurisdiksi, memanfaatkan celah regulasi antarnegara (regulatory arbitrage) di mana otoritas pengawas keuangan Jerman (BaFin) justru tidak memiliki kewenangan pengawasan langsung terhadap Wirecard AG sebagai entitas teknologi (bukan bank), sementara entitas anak perusahaannya di Asia berada di luar yurisdiksi Jerman sepenuhnya. Pressure kemungkinan berasal dari ekspektasi pasar yang sangat tinggi terhadap pertumbuhan Wirecard sebagai 'PayPal Eropa', mendorong manajemen menciptakan ilusi volume bisnis Asia yang sebenarnya tidak proporsional dengan kapasitas riil perusahaan. Sementara itu, keberpihakan awal regulator dan sebagian investor terhadap Wirecard yang justru menyerang balik para kritikus dan short-seller menciptakan rationalization kolektif di pasar bahwa tuduhan kecurangan hanyalah upaya manipulasi pasar oleh pihak yang berkepentingan negatif terhadap saham Wirecard.

Sebagai calon auditor, pelajaran paling mendasar dari kasus ini adalah bahwa reputasi besar sebuah firma audit global (Big Four) tidak dapat menjadi pengganti pelaksanaan prosedur audit dasar secara konsisten dan independen. Auditor semestinya tetap skeptis terhadap klien yang menunjukkan pertumbuhan bisnis luar biasa cepat dan tidak proporsional dibandingkan pesaing sejenis, khususnya ketika sebagian besar pertumbuhan tersebut berasal dari yurisdiksi dengan transparansi regulasi rendah. Prosedur konfirmasi eksternal untuk saldo material terutama kas dan

setara kas harus dilakukan secara langsung oleh auditor kepada bank/pihak ketiga tanpa perantara manajemen klien, guna menghindari potensi pemalsuan dokumen konfirmasi seperti yang terjadi dalam kasus ini melalui surat konfirmasi bank palsu.

Dampak kasus Wirecard sangat luas terhadap reformasi regulasi audit di Eropa: ia memicu penyelidikan resmi Komisi Eropa terhadap kegagalan pengawasan BaFin, mendorong reformasi undang-undang pengendalian neraca Jerman, dan menjadi preseden penting bagi denda serta larangan praktik yang dijatuhkan kepada Big Four di kemudian hari, termasuk kasus Carillion yang akan dibahas pada sumber berikutnya dalam portofolio ini.

3. Simpulan Singkat Sumber Ini

Kasus Wirecard membuktikan bahwa kegagalan menerapkan prosedur audit paling dasar konfirmasi bank pihak ketiga dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa terdeteksi apabila auditor terlalu bergantung pada representasi manajemen, dan bahwa kompleksitas bisnis lintas yurisdiksi dapat dimanfaatkan untuk menghindari pengawasan regulasi yang efektif.

SUMBER 8

Judul Sumber	Kegagalan Audit KPMG atas Carillion plc dan Denda Rekord Financial Reporting Council Inggris
Jenis Sumber	Berita Media Massa Internasional / Laporan Regulator
Penulis / Media / Instansi	Financial Reporting Council (FRC); Euronews; New Civil Engineer
Tahun Terbit	2023
Referensi (APA)	Financial Reporting Council. (2023, 12 Oktober). Sanctions against KPMG LLP, KPMG Audit plc and two former partners. https://www.frc.org.uk/news-and-events/news/2023/10/sanctions-against-kpmg-llp-kpmg-audit-plc-and-two-former-partners/

1. Ringkasan Isi Sumber

Carillion plc adalah perusahaan konstruksi dan manajemen fasilitas multinasional asal Inggris yang menjadi salah satu kontraktor pemerintah terbesar, mengerjakan proyek-proyek publik penting seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, penjara, hingga layanan katering rumah sakit dan makan siang sekolah. KPMG bertindak sebagai auditor Carillion selama sembilan belas tahun dan memberikan opini audit tanpa pengecualian (unqualified) atas laporan keuangan Carillion untuk tahun buku 2014, 2015, dan 2016, termasuk opini yang diterbitkan pada 1 Maret 2017 hanya beberapa bulan sebelum perusahaan mengumumkan provisi kerugian besar-besaran.

Pada Juli dan September 2017, Carillion mengumumkan provisi kerugian mencapai 1,045 miliar poundsterling, terutama berasal dari kerugian atas sejumlah kontrak proyek serta penurunan nilai goodwill sebesar 134 juta poundsterling. Perusahaan akhirnya dinyatakan pailit pada Januari 2018 dengan kondisi keuangan yang mengejutkan: hanya memiliki kas 29 juta poundsterling namun menanggung kewajiban (liabilities) senilai 7 miliar poundsterling. Keruntuhan ini berdampak pada hilangnya ribuan lapangan kerja dan mengganggu ratusan proyek sektor publik di seluruh Inggris.

Financial Reporting Council (FRC), regulator audit Inggris, membuka investigasi terhadap KPMG segera setelah Carillion dinyatakan pailit, dan setelah proses investigasi selama lebih dari lima tahun, akhirnya menjatuhkan denda rekor sebesar 21 juta poundsterling (setelah diskon 30 persen atas kerja sama KPMG) pada Oktober 2023 denda terbesar yang pernah dijatuhkan FRC dalam sejarahnya. Investigasi menemukan bahwa KPMG dan partner penanggung jawab audit, Peter Meehan, gagal merespons berbagai perusahaan bahwa operasi inti Carillion sesungguhnya

merugi dan sangat bergantung pada erusah-langkah arus kas jangka pendek yang tidak berkelanjutan, khususnya terkait opini going concern perusahaan pada audit 2016.

2. Analisis & Pendapat Pribadi

Kasus Carillion menjadi pelengkap penting bagi kasus Wirecard dalam portofolio ini karena keduanya menunjukkan kegagalan audit oleh firma Big Four, namun dengan karakteristik pelanggaran yang berbeda. Jika Wirecard menyoroti kegagalan verifikasi eksistensi aset (existence assertion), Carillion lebih menyoroti kegagalan penilaian kelangsungan usaha (going concern assessment) dan skeptisisme profesional terhadap estimasi manajemen atas kontrak konstruksi jangka Panjang sebuah tema yang menggemakan kembali pola manipulasi Toshiba, meski dengan konteks kegagalan mendeteksi (bukan kegagalan menyembunyikan secara aktif) yang lebih dominan pada kasus Carillion.

Temuan FRC yang paling signifikan adalah bahwa KPMG gagal menantang dan menelaah secara kritis penilaian serta estimasi manajemen Carillion (management's judgements and estimates), bahkan ketika estimasi tersebut tampak tidak masuk akal atau tidak konsisten dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini adalah pelanggaran mendasar terhadap prinsip profesional scepticism yang menjadi jantung dari setiap standar audit modern auditor tidak boleh menerima representasi manajemen begitu saja, melainkan wajib mengevaluasi secara kritis dan objektif, terutama untuk area-area yang mengandung tingkat subjektivitas tinggi seperti estimasi biaya kontrak jangka panjang dan penilaian goodwill.

Dari perspektif teori fraud triangle meskipun kasus Carillion lebih tepat digambarkan sebagai kombinasi kegagalan tata kelola korporat dan audit failure ketimbang fraud murni yang disengaja elemen opportunity muncul dari kompleksitas kontrak konstruksi multi-tahun yang sulit dinilai objektif oleh pihak eksternal, sementara elemen pressure pada manajemen Carillion kemungkinan berasal dari kebutuhan mempertahankan valuasi saham dan kepercayaan investor di tengah margin bisnis konstruksi yang secara struktural memang tipis dan sangat kompetitif. FRC secara eksplisit mencatat adanya 'risiko terhadap objektivitas' auditor karena signifikansi Carillion sebagai klien penting bagi KPMG sebuah indikasi bahwa familiarity dan self-interest threat turut berperan, mirip dengan pola yang ditemukan pada kasus SNP Finance di Indonesia.

Sebagai calon auditor, kasus Carillion menegaskan pentingnya menerapkan skeptisisme profesional secara konsisten sepanjang periode penugasan, bukan hanya pada tahun-tahun awal perikatan. KPMG telah mengaudit Carillion selama 19 tahun tanpa rotasi partner yang memadai, sebuah durasi yang berpotensi menumbuhkan familiarity threat dan mengikis independensi mental auditor terhadap manajemen klien. Rotasi audit tenure secara berkala baik rotasi partner maupun rotasi KAP sebagaimana diwajibkan di berbagai yurisdiksi termasuk Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 menjadi mekanisme penting untuk menjaga objektivitas jangka panjang auditor.

Dampak kasus ini terhadap regulasi audit Inggris sangat signifikan: misalnya kasus keruntuhan BHS dua tahun sebelumnya, Carillion memicu tiga kajian pemerintah terhadap pasar dan standar audit di Inggris, serta mendorong wacana Audit Reform Bill yang hingga kini masih dalam pembahasan legislative. Pernyataan CEO KPMG UK, Jon Holt, yang secara terbuka mengakui bahwa pekerjaan audit firmnya 'sangat buruk' menjadi pengakuan langka dari sebuah firma Big Four atas kegagalan mendasar dalam pelaksanaan tugas profesionalnya.

3. Simpulan Singkat Sumber Ini

Kasus Carillion menegaskan bahwa durasi perikatan audit yang sangat panjang tanpa rotasi memadai dapat mengikis skeptisisme profesional auditor terhadap estimasi manajemen, dan bahwa opini going concern yang keliru pada kontraktor besar dapat menimbulkan dampak sosial luas ketika menyangkut proyek-proyek layanan publik esensial.

SUMBER 9

Judul Sumber	Fraud Triangle sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan
Jenis Sumber	Jurnal Ilmiah Akuntansi
Penulis / Media / Instansi	Wahyuni, W., & Budiwitjaksono, G. S.
Tahun Terbit	2017
Referensi (APA)	Wahyuni, W., & Budiwitjaksono, G. S. (2017). Fraud triangle sebagai pendeteksi kecurangan laporan keuangan. Jurnal Akuntansi, 21(1), 47-61. https://doi.org/10.24912/ja.v21i1.133

1. Ringkasan Isi Sumber

Artikel jurnal ini mengangkat teori fraud triangle yang dikembangkan oleh kriminolog Donald R. Cressey pada 1953 sebagai kerangka untuk mendeteksi kecenderungan kecurangan pelaporan keuangan (fraudulent financial reporting) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teori fraud triangle menjelaskan bahwa kecurangan cenderung terjadi ketika tiga elemen hadir secara bersamaan: pressure (tekanan finansial atau non-finansial yang mendorong seseorang melakukan kecurangan), opportunity (kesempatan yang muncul akibat lemahnya pengendalian internal atau pengawasan), dan rationalization (pembenaran diri yang membuat pelaku merasa tindakannya bukan sebuah kejahatan).

Dalam penelitian akuntansi empiris, ketiga elemen fraud triangle tersebut umumnya diproksikan menggunakan variabel-variabel keuangan yang dapat diukur dari laporan keuangan publik. Elemen pressure kerap diproksikan melalui financial stability (stabilitas keuangan yang diukur dari perubahan aset), financial targets (target laba yang harus dicapai, biasanya diukur melalui Return on Assets), dan external pressure (tekanan pihak eksternal seperti kewajiban pembayaran utang yang diukur melalui leverage ratio). Elemen opportunity sering diproksikan melalui kualitas pengawasan (ineffective monitoring) yang diukur dari proporsi komisaris independen, sementara elemen rationalization diproksikan melalui pergantian auditor (change in auditor) atau opini auditor sebagai indikator adanya opinion shopping.

Studi-studi yang direview dalam jurnal ini menunjukkan hasil yang beragam dan tidak selalu konsisten mengenai signifikansi masing-masing proksi tersebut terhadap kejadian fraudulent financial reporting, mengindikasikan bahwa fraud triangle meskipun menjadi kerangka teori dasar yang sangat berpengaruh dalam standar audit internasional (termasuk diadopsi dalam SAS No. 99 di Amerika Serikat) masih memerlukan penyempurnaan proksi pengukuran empiris

agar dapat digunakan secara lebih andal sebagai alat deteksi dini kecurangan pelaporan keuangan oleh auditor maupun regulator pasar modal.

2. Analisis & Pendapat Pribadi

Artikel jurnal ini memiliki relevansi sangat tinggi terhadap sembilan sumber lain dalam portofolio ini, karena hampir seluruh kasus fraud dan kegagalan audit yang telah saya analisis sebelumnya mulai dari Garuda Indonesia, SNP Finance, Jiwasraya, Asabri, hingga Enron, Toshiba, dan Wirecard dapat dipetakan ke dalam kerangka fraud triangle yang dibahas dalam jurnal ini. Hal ini menegaskan bahwa fraud triangle bukan sekadar konsep teoretis abstrak, melainkan kerangka analisis praktis yang secara konsisten dapat menjelaskan pola kemunculan fraud lintas negara, lintas sektor, dan lintas era, dari skandal Enron pada 2001 hingga kasus Asabri pada 2021.

Yang menarik dari perspektif akademik adalah temuan bahwa hasil penelitian empiris mengenai proksi fraud triangle di Indonesia cenderung tidak konsisten antarstudi sebagian penelitian menemukan bahwa financial stability berpengaruh signifikan terhadap fraud, sementara penelitian lain tidak menemukan hubungan yang sama meski menggunakan sampel dan periode yang berbeda. Menurut pandangan saya, ketidakkonsistenan ini kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan mendasar dalam mengukur konstruk psikologis dan perilaku (seperti tekanan personal atau rasionalisasi individu) hanya melalui rasio keuangan agregat perusahaan, padahal fraud pada dasarnya adalah keputusan individual yang dipengaruhi banyak faktor kontekstual dan personal yang sulit ditangkap oleh data akuntansi semata.

Sebagai contoh konkret dari kasus-kasus yang telah saya bahas, elemen opportunity pada kasus Enron justru lebih didorong oleh kompleksitas struktur SPE dan konflik kepentingan auditor-konsultan, bukan semata proporsi komisaris independen sebagaimana lazim diproksikan dalam studi akademik Indonesia. Demikian pula elemen rationalization pada kasus Toshiba justru lebih dijelaskan oleh faktor budaya organisasi hierarkis Jepang, bukan oleh pergantian auditor sebagaimana proksi konvensional dalam literatur. Hal ini menunjukkan bahwa proksi kuantitatif standar dalam penelitian akademik mungkin perlu dilengkapi dengan analisis kualitatif kontekstual seperti budaya organisasi, struktur tata kelola, dan sejarah hubungan auditor-klien agar model deteksi fraud lebih komprehensif dan aplikatif bagi praktik audit riil.

Dari sudut pandang praktik pemeriksaan akuntansi, jurnal ini mengingatkan saya bahwa fraud triangle sesungguhnya lebih tepat digunakan sebagai kerangka berpikir kualitatif untuk merancang prosedur audit responsif terhadap risiko (risk-responsive audit procedures), bukan sekadar model prediksi statistik semata. Ketika auditor menemukan indikasi financial stability yang menurun (misalnya melalui analytical review atas tren aset dan profitabilitas), hal tersebut semestinya memicu peningkatan kewaspadaan dan perluasan prosedur audit pada area-area yang rentan dimanipulasi, sejalan dengan pendekatan risk-based audit yang menjadi paradigma dominan dalam Standar Audit internasional (ISA) maupun SPAP di Indonesia sejak beberapa dekade terakhir.

Keterkaitan jurnal ini dengan mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi sangat jelas: fraud triangle menjadi salah satu materi inti yang mendasari perancangan prosedur audit untuk mendeteksi risiko kecurangan (fraud risk assessment) sebagaimana diamanatkan Standar Audit 240. Studi literatur semacam ini penting bagi calon auditor untuk memahami bahwa deteksi fraud bukanlah proses linear sederhana, melainkan memerlukan kombinasi antara pemahaman teori perilaku (behavioral theory), analisis data kuantitatif, dan penilaian profesional (professional judgment) yang tajam terhadap konteks bisnis klien secara menyeluruh.

3. Simpulan Singkat Sumber Ini

Jurnal ini menegaskan bahwa fraud triangle tetap relevan sebagai kerangka analisis kualitatif untuk merancang prosedur audit berbasis risiko, meskipun proksi kuantitatif standarnya dalam penelitian akademik Indonesia belum sepenuhnya konsisten dan perlu dilengkapi analisis kontekstual yang lebih mendalam.

SUMBER 10

Judul Sumber	Analisis Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit di Indonesia
Jenis Sumber	Jurnal Ilmiah Akuntansi
Penulis / Media / Instansi	Nindita, C., & Siregar, S. V.
Tahun Terbit	2012
Referensi (APA)	Nindita, C., & Siregar, S. V. (2012). Analisis pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap kualitas audit di Indonesia. <i>Jurnal Akuntansi dan Keuangan</i> , 14(2). https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/18711

1. Ringkasan Isi Sumber

Penelitian ini menguji apakah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) diukur melalui jumlah partner, jumlah staf auditor, jumlah klien, dan pendapatan KAP memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit di Indonesia. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur melalui dua pendekatan, yaitu kualitas akrual (*accruals quality*) dan kecenderungan pemberian opini audit *going concern*. Sampel penelitian terdiri atas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006–2008, dengan total 348 observasi tahun-perusahaan (*firm-years*).

Latar belakang penelitian ini berangkat dari asumsi umum dalam literatur audit internasional yang menyatakan bahwa KAP besar, khususnya kelompok Big Four, cenderung menghasilkan audit berkualitas lebih tinggi dibandingkan KAP kecil (*Non-Big Four*), karena KAP besar memiliki sumber daya lebih memadai, reputasi yang lebih dipertaruhkan (*greater reputation capital at stake*), dan kemampuan menahan tekanan klien yang lebih kuat akibat basis klien yang lebih terdiversifikasi. Asumsi inilah yang mendasari banyak keputusan bisnis di pasar modal, termasuk keputusan investor dan kreditor yang cenderung lebih mempercayai laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Big Four.

Hasil penelitian menggunakan analisis regresi berganda dan regresi logistik menunjukkan temuan yang mengejutkan: baik untuk sampel keseluruhan maupun untuk kedua sub-sampel (perusahaan yang diaudit KAP Big Four dan perusahaan yang diaudit KAP *Non-Big Four*), tidak ditemukan pengaruh signifikan ukuran KAP terhadap kualitas audit. Dengan kata lain, KAP besar tidak selalu menghasilkan audit berkualitas tinggi, dan kualitas audit antara KAP besar dan KAP kecil di Indonesia pada periode penelitian tersebut dapat dianggap relatif seragam (*fairly uniform*).

2. Analisis & Pendapat Pribadi

Temuan jurnal ini sesungguhnya menjadi konfirmasi akademik yang kuat terhadap pola yang telah saya amati secara konsisten di sembilan sumber lain dalam portofolio ini: kegagalan audit terjadi tidak hanya pada KAP kecil, melainkan juga pada KAP Big Four ternama seperti Deloitte (kasus SNP Finance), Arthur Andersen (kasus Enron, yang bahkan merupakan salah satu Big Five saat itu), EY (kasus Wirecard), dan KPMG (kasus Carillion). Fakta bahwa keempat firma tersebut merupakan bagian dari kelompok firma audit paling elit dan bereputasi tertinggi di dunia, namun tetap mengalami kegagalan audit fatal, memberikan bukti empiris nyata yang sejalan dengan kesimpulan penelitian Nindita dan Siregar bahwa ukuran KAP bukan jaminan otomatis kualitas audit.

Menurut pandangan saya, temuan ini penting untuk mengoreksi asumsi umum masyarakat maupun investor yang cenderung menyamakan reputasi besar sebuah KAP dengan jaminan keandalan opini audit yang diterbitkan. Reputasi KAP sesungguhnya lebih mencerminkan kapasitas rata-rata (average capacity) firma secara keseluruhan, sedangkan kualitas audit aktual pada setiap penugasan sangat bergantung pada faktor-faktor pada level individual dan tim perikatan, seperti kompetensi partner penanggung jawab, tekanan waktu dan anggaran (budget pressure) yang dihadapi tim audit, tingkat independensi mental yang dijaga sepanjang perikatan, serta efektivitas sistem pengendalian mutu internal KAP dalam mengawasi kualitas setiap penugasan individual bukan hanya kebijakan kualitas di tingkat korporat/global.

Jika dikaitkan dengan konsep audit tenure yang muncul pada kasus Carillion (perikatan KPMG selama 19 tahun) dan Wirecard (EY selama lebih dari satu dekade), saya berpendapat bahwa penelitian lanjutan mengenai kualitas audit semestinya tidak hanya melihat variabel ukuran KAP secara statis, melainkan juga mempertimbangkan interaksi antara ukuran KAP dengan durasi perikatan, tingkat konsentrasi pendapatan dari klien tertentu terhadap total pendapatan KAP (client importance), serta ada-tidaknya jasa non-audit yang diberikan kepada klien yang sama sebagaimana menjadi akar masalah independensi pada kasus Enron. Variabel-variabel interaksi semacam ini kemungkinan memiliki daya penjelas yang lebih kuat terhadap kualitas audit riil dibandingkan sekadar ukuran KAP secara agregat.

Dari sudut pandang kebijakan publik dan regulasi profesi, temuan jurnal ini memperkuat argumen bahwa pengawasan terhadap kualitas audit tidak boleh hanya berfokus pada KAP besar dengan asumsi mereka otomatis lebih aman, melainkan perlu diterapkan secara merata melalui mekanisme seperti inspeksi berkala oleh regulator (di Indonesia melalui PPPK Kementerian Keuangan dan OJK, atau di tingkat internasional melalui PCAOB dan FRC), penerapan sistem peer review antar-KAP, serta publikasi hasil inspeksi kualitas audit KAP secara transparan kepada publik agar investor dan kreditor dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi, tidak semata mengandalkan nama besar firma audit.

Sebagai calon auditor, *rofessio* penting dari jurnal ini *rofes* bahwa kualitas audit pada akhirnya merupakan tanggung jawab personal dan tim, bukan sekadar warisan otomatis dari

besarnya organisasi tempat bekerja. Bekerja di KAP Big Four memang memberikan akses terhadap metodologi audit yang lebih terstandarisasi, pelatihan berkelanjutan, dan sumber daya teknis yang lebih lengkap, namun hal tersebut tidak menggantikan kebutuhan setiap auditor individual untuk menjaga skeptisisme profesional, integritas, dan kecermatan profesional (due professional care) dalam setiap penugasan yang dijalankannya.

3. Simpulan Singkat Sumber Ini

Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit di Indonesia, sebuah temuan yang konsisten dengan pola kegagalan audit oleh KAP Big Four dalam berbagai kasus internasional, dan menegaskan bahwa kualitas audit sesungguhnya ditentukan oleh faktor-faktor pada level penugasan individual, bukan semata reputasi institusional.

KESIMPULAN

Setelah menelusuri dan menganalisis sepuluh sumber di atas mencakup empat kasus BUMN/emiten Indonesia, empat kasus korporasi internasional, dan dua artikel jurnal akademik benang merah yang paling menonjol adalah bahwa kegagalan audit dan kecurangan pelaporan keuangan hampir selalu melibatkan kombinasi dari tiga hal: tekanan performa yang tidak realistis terhadap manajemen, celah dalam penerapan skeptisisme profesional auditor (baik karena konflik kepentingan, familiarity threat, maupun sekadar kelalaian prosedural), dan lemahnya pengawasan eksternal yang seharusnya menjadi pengaman terakhir. Pola ini berulang secara konsisten dari Enron pada 2001 hingga Asabri pada 2021, menunjukkan bahwa meskipun regulasi audit terus diperkuat dari waktu ke waktu mulai dari Sarbanes-Oxley Act pasca-Enron hingga penguatan pengawasan OJK dan PPPK pasca-kasus Garuda dan SNP Finance elemen manusia dalam profesi audit tetap menjadi titik kerentanan yang paling sulit dieliminasi sepenuhnya oleh aturan tertulis.

Temuan yang juga konsisten adalah bahwa reputasi besar sebuah KAP, baik jaringan internasional (BDO, Deloitte, EY, KPMG, dan mendiang Arthur Andersen) maupun sekadar besar secara lokal, tidak menjamin kualitas audit pada setiap penugasan individual sebuah kesimpulan yang didukung baik oleh bukti empiris dari sepuluh kasus dalam portofolio ini maupun oleh penelitian akademik yang secara spesifik menguji hubungan antara ukuran KAP dan kualitas audit di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa kepercayaan terhadap laporan keuangan seharusnya tidak dibangun semata dari nama besar auditor, melainkan dari sistem tata kelola yang berlapis: pengawasan internal yang kuat, komite audit yang independen dan kompeten, regulator sektoral yang proaktif, serta budaya profesional individual auditor yang menjunjung tinggi integritas meski di bawah tekanan komersial.

Sebagai refleksi pribadi, penyusunan portofolio ini memperkuat pemahaman saya bahwa mempelajari Pemeriksaan Akuntansi bukan sekadar menghafal prosedur dan standar audit secara teknis, melainkan melatih kepekaan untuk mengenali pola-pola risiko kecurangan dalam konteks bisnis yang selalu berubah dan semakin kompleks mulai dari skema SPE Enron di awal 2000-an hingga skema fintech lintas yurisdiksi Wirecard dua dekade kemudian. Sebagai calon praktisi akuntansi maupun auditor di masa depan, saya menyadari bahwa integritas profesional dan keberanian menyampaikan pendapat yang tidak populer kepada klien (seperti opini going concern atau qualified opinion) sering kali menjadi ujian yang jauh lebih berat dibandingkan sekadar penguasaan teknis standar akuntansi, namun justru pada momen-momen tersebutlah nilai sejati profesi ini dipertaruhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2020, 9 Maret). Kerugian negara kasus Jiwasraya Rp16,81 triliun. <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun>
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2021, 31 Mei). Kasus PT Asabri rugikan negara Rp22,78 triliun. <https://warta.bpk.go.id/kasus-pt-asabri-rugikan-negara-rp2278-triliun/>
- Britannica. (2026). Enron scandal: Accounting fraud, corporate greed, bankruptcy. <https://www.britannica.com/event/Enron-scandal>
- CNBC Indonesia. (2018, 1 Oktober). Konkret! Buntut kasus SNP, kantor akuntan ini disanksi OJK. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181001163138-4-35527/konkret-buntut-kasus-snp-kantor-akuntan-ini-disanksi-ojk>
- CNBC Indonesia. (2020, 21 September). Skandal Jiwasraya: Negara rugi Rp16,8 T, aset sitaan Rp18,4 T. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200921145035-17-188250>
- CNBC. (2015, 20 Juli). Toshiba inflated profits by \$1.2 bln with top execs' knowledge - investigation. <https://www.cnn.com/2015/07/20/toshiba-inflated-profits-by-12-bln-with-top-execs-knowledge--investigation.html>
- CNN Business. (2023, 3 April). EY banned from auditing public interest companies in Germany over Wirecard. <https://www.cnn.com/2023/04/03/business/wirecard-ey-ban-germany/>
- CNN Indonesia. (2018, 25 September). Kasus SNP Finance, Bank Mandiri pidanakan Deloitte Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180925191223-78-333175>
- Euronews. (2023, 12 Oktober). KPMG fined record £21 million for Carillion audits. <https://www.euronews.com/business/2023/10/12/kpmg-fined-record-21-million-for-carillion-audits>
- Financial Reporting Council. (2023, 12 Oktober). Sanctions against KPMG LLP, KPMG Audit plc and two former partners. <https://www.frc.org.uk/news-and-events/news/2023/10/sanctions-against-kpmg-llp-kpmg-audit-plc-and-two-former-partners/>
- Kompas.com. (2020, 9 Januari). Simak, ini kronologi lengkap kasus Jiwasraya versi BPK. <https://money.kompas.com/read/2020/01/09/063000926/simak-ini-kronologi-lengkap-kasus-jiwasraya-versi-bpk>
- Kompas.com. (2021, 31 Mei). Ketua BPK: Kerugian negara dalam kasus korupsi Asabri Rp22,78 triliun. <https://money.kompas.com/read/2021/05/31/150940926/bpk-kerugian-negara-akibat-kasus-korupsi-asabri-capai-rp-2278-triliun>
- Kompas.id. (2019, 28 Juni). Garuda Indonesia didenda Rp100 juta dan diminta perbaiki laporan keuangan. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/06/28/garuda-indonesia-didenda-rp-100-juta-dan-diminta-perbaiki-laporan-keuangan>

- New Civil Engineer. (2023, 13 Oktober). KPMG fined £21M for Carillion audit failures after 'damning' findings. <https://www.newcivilengineer.com>
- Nindita, C., & Siregar, S. V. (2012). Analisis pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap kualitas audit di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 14(2). <https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/18711>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019, 28 Juni). Siaran pers: Otoritas Jasa Keuangan berikan sanksi kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers>
- Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kemenkeu. (2019). Ditemukan pelanggaran pada audit laporan keuangan Garuda, izin AP Kasner Sirumapea dibekukan. <https://pppk.kemenkeu.go.id>
- PYMNTS.com. (2024). German agency criticizes EY's audits of Wirecard. <https://www.pymnts.com/news/security-and-risk/2024/german-agency-criticizes-eyes-audits-of-wirecard/>
- Tempo.co. (2018, 28 September). Kasus SNP Finance, Kemenkeu jatuhkan sanksi ke Deloitte Indonesia. <https://www.tempo.co/ekonomi/kasus-snp-finance-kemenkeu-jatuhkan-sanksi-ke-deloitte-indonesia-812713>
- Time. (2015, 21 Juli). Japan: Toshiba bosses accused of padding profits by \$1.2 billion. <https://time.com/3965428/toshiba-accounts-scandal/>
- Transparently.ai. (2024). The Toshiba accounting scandal. <https://www.transparently.ai/blog/toshiba-accounting-scandal>
- Wahyuni, W., & Budiwitjaksono, G. S. (2017). Fraud triangle sebagai pendeteksi kecurangan laporan keuangan. Jurnal Akuntansi, 21(1), 47-61. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i1.133>
- Wikipedia. (2026). Enron scandal. https://en.wikipedia.org/wiki/Enron_scandal
- Wikipedia. (2026). Wirecard scandal. https://en.wikipedia.org/wiki/Wirecard_scandal